

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.¹

Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi dimana-mana. Di dalam Negeri tuntutan terhadap pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan, dan juga segi kualitas yaitu meningkatnya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih baik.

Dalam Islam masalah pendidikan juga mendapat perhatian dan dengan menegaskan pula betapa pentingnya mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti dalam firman Allah dalam surah Az-zumar ayat 9:

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءِإِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 77

Pada ayat tersebut sangat jelas perbedaan antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki. Perbedaan yang di maksud berdasarkan dari sikap, kepribadian, dan cara berkomunikasi dengan orang lain yang ada di sekitar lingkungan.

Dalam undang-undang telah dirumuskan mengenai pendidikan yang tertuang dalam undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) no.20 tahun 2003:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.²

Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapi kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.³

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen pembiayaan sangat perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.⁴

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Citra Umbara, 2003), h.3

³ *Ibid*, h 78

⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala sekolah yang profesional (dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). Cet 5, h. 194.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada keterbatasan dana.⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas Kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan tersebut memberikan wewenang kepada sekolah untuk bersikap mandiri mengenai keuangan sekolah. Walaupun sekolah sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti dana DIPA , namun tidak menutup kemungkinan sekolah mencari dana baik dengan masyarakat pengguna jasa sekolah (orang tua siswa), maupun anggota masyarakat dan dunia usaha yang tidak bersifat mengikat.⁶

Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana

⁵ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 48

⁶ Khairuddin w, Irwan Nasution, *Quantum Teaching*. (Jakarta: Ciputat Press Group. 2006), h. 17-18.

dan sumber belajar. Sekolah tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal karena masalah pembiayaan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang gratis dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian dan penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah dibawah pimpinan dan koordinasi Kepala sekolah dengan pihak berwenang dalam menangani masalah keuangan sekolah. Hal ini diperlukan karena sekolah yang paling memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi pengalokasian, dan penggunaan uang sudah seharusnya serahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberikan kebebasan untuk mencari dana melalui berbagai kegiatan yang dapat mendatangkan hasil (*income generating activities*), agar perkembangan kedepan sumber keuangan tidak semata-mata mengharap dari pemerintah.⁷

Manajemen pembiayaan di sekolah terutama berkenaan dengan usaha sekolah dalam menggali dana, usaha sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen pembiayaan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas.

Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional

⁷ *Ibid*, h. 22.

sekolah, juga diperlukan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat, sumber-sumber lainnya.

Dana diperlukan untuk pembiayaan kegiatan pendidikan, dana dapat bersumber dari bantuan pemerintah, orang tua murid, spp murid, sumbangan masyarakat maupun hasil usaha sekolah itu sendiri, misalnya dengan berwiraswasta membuka kantin, wartel, toko ATK dan koperasi.

Dari strategi pembangunan sekolah, secara fisik barang kali keberhasilannya lebih ditentukan kepada peran birokrat atau aparat pemerintah, namun keberhasilan pendidikan secara berkualitas akan lebih banyak tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara sekolah itu sendiri, karena bagaimanapun bagus sekolah, canggihnya peralatan penunjang pembelajaran yang tersedia, jika guru atau tenaga pengajarnya tidak mampu, maka resiko kegagalan pun akan sangat tinggi.⁸ Untuk meningkatkan kualitas sekolah agar semua proses dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi harapan para stakeholdernya membutuhkan pengelolaan biaya yang profesional baik dalam penggalan sumber dana maupun pendistribusian dananya. Untuk itu sekolah hendaknya memenuhi standar pembiayaan minimal. Pembiayaan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya personal mencakup biaya-biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan biaya operasi sekolah mencakup:

⁸ Abdul Rohman Sheleh, *sekolah dan Pendidikan Anak Bangsa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, ntelekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi dan lain-lain.⁹

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah atau sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana, dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.¹⁰

SMP Negeri 3 kertak Hanyar sebagai sekolah menengah yang berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, dengan topografi daerah persawahan atau lahan gambut. Namun demikian input dari sekolah pendukung sangat memuaskan karena merupakan daerah yang sedang berkembang yang dibuktikan dengan banyaknya penambahan perumahan di

⁹ Khaeruddin dan Mahfrud Junaedi dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di sekolah* (Yogyakarta: Nuansa aksara, 2007), h. 67

¹⁰ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, op. cit.*, h. 194

sekitar lokasi Sekolah. Kondisi bangunan sekolah yang lama sudah berganti dengan kondisi bangunan yang baru sehingga membuat kondisi PBM menjadi berkembang lebih baik.

Mengingat betapa pentingnya pengelolaan keuangan bagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di SMP NEGERI 3 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih jauh yang akan tersusun dalam sebuah skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di SMP Negeri 3 Kertak Hanyar**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan pada pelaksanaan manajemen pembiayaan di SMP Negeri 3 Kertak Hanyar ?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di SMP Negeri 3 Kertak Hanyar ?
3. Bagaimana evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan di SMP Negeri 3 Kertak Hanyar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pada pelaksanaan manajemen pembiayaan di SMP Negeri 3 Kertak Hanyar.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di SMP Negeri 3 Kertak Hanyar.
3. untuk mengetahui bagaimana evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan di SMP Negeri 3 Kertak Hanyar.

D. Definisi Operasional

Judul dari skripsi ini adalah “Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di SMP Negeri Kertak Hanyar” untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Manajemen Pembiayaan

Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses sosial, yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu atau yang telah ditetapkan dengan efektif.

Manajemen sebagai suatu proses sosial meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang baik orang-orang yang berada di dalam maupun diluar lembaga atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang.¹¹ Sedangkan proses manajemen terdiri dari 4 unsur yaitu *pertama*, perencanaan meliputi penciptaan, penyusunan program dan penyusunan proyek. *Kedua*, pengorganisasian meliputi perakitan sumber dan pengstafan. *Ketiga*,

¹¹ Iwa Sukiswa, *Dasar-dasar Umum Manajemen Pendidikan* (Bandung: Tarsito, 1986), h.

pengarahan meliputi motivasi, supervise dan koordinasi. *Keempat*, pengawasan meliputi penganggaran, pelaporan dan evaluasi.¹²

Dalam pengertian sehari-hari istilah pembiayaan yang berasal dari kata *finance* dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas yang akan dilakukan.¹³

Dalam penyelenggaraan pendidikan keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lain.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan dan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa.

2. SMP Negeri 3 Kertak Hanyar berdiri sejak tahun 1986 yang berlokasi di Manarap Tengah, kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Dengan luas lahan yang dimiliki Sekolah 17.796 m² dan luas bangunan seluruhnya 1.920 m².

adapun visi dan misi yang di miliki SMP Negeri 3 Kertak Hanyar adalah sebagai berikut:

1) VISI

¹² *Ibid*, h. 15

¹³ Harbangan Siagian, *Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistematis* (Semarang: Satya Wacana, 1989), h. 130

¹⁴ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, *op. cit.*, h. 47.

“ Terwujudnya Peserta Didik yang Beriman dan Bertakwa, Berakhlak Mulia, Mandiri dan Terampil Berdasarkan Imtaq yang Berwawasan Lingkungan ”

2) MISI

- Melaksanakan penerapan akhlak mulia dalam kegiatan di dalam dan di luar kelas.
- Mengoptimalkan pembelajaran mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, perbaikan dan pengayaan serta program khusus yang menunjang perkembangan kompetensi siswa.
- Mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri dan terampil.
- Mensinergikan semua kemampuan yang dimiliki *Stake Holder*.
- Memacu siswa dalam bidang akademik dan non akademik.
- Mengirim guru dan siswa dalam berbagai perlombaan.

Jadi menurut penulis yang dimaksud pelaksanaan manajemen pembiayaan di SMP Negeri 3 Kertak Hanyar di sini adalah segala proses tata laksana ataupun pengelolaan keuangan SMP Negeri 3 Kertak Hanyar, yang meliputi :

- a. Manajemen perencanaan Keuangan Sekolah, mencakup kegiatan penyusunan anggaran dan Pengembangan RAPBS,
- b. Manajemen pelaksanaan keuangan sekolah, mencakup penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah, dan
- c. Manajemen evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

E. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat memiliki kegunaan sebagai :

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi upaya pengembangan keilmuan bidang Manajemen Pendidikan, khususnya Manajemen Keuangan.

2. Praktis

a. SMP NEGERI 3 kertak hanyar Kabupaten Banjar, sebagai masukan bagi sekolah agar dapat menjalankan salah satu perannya dengan baik, yakni sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dengan manajemen pembiayaan yang tepat.

b. Sebagai bahan masukan dan pokok pikiran bagi semua yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan di SMP NEGERI 3 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

c. IAIN Antasari

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan dan sebagai bahan dokumentasi sehingga dapat dijadikan bahan perkembangan dalam pelayanan pendidikan, dan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan judul yang terkait dengan penelitian ini.

d. Peneliti

Sebagai bekal ilmu pengetahuan yang nantinya akan sangat berguna apabila penulis menjadi tenaga kependidikan dalam sebuah lembaga pendidikan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan karya tulis ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dan alasan memilih judul gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarakan kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah - istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penelitian merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan teoritis, yaitu suatu teori untuk memecahkan masalah yang membahas tentang Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan ,yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dan sebagai pedoman dalam penganalisaan data.

Bab III adalah membahas metode penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar dapat tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan

dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam pengumpulan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka buatlah teknik pengolahan data, analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan – tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, mengemukakan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran. Sedangkan bagian akhir berisi daftar pustaka serta lampiran – lampiran.